

BEBERAPA ASPEK DALAM KESEJAHTERAAN KELUARGA

Oleh :

*Dr.Ir. Hidayat Syarif, MS *)*

*Ir. Hartoyo, M.Sc. **)*

**) (Karo Pendidikan, Agama, Pemuda dan Olahraga, BAPPENAS)*

****) (GMSK, FAPERTA IPB)*

Disampaikan pada seminar:

**Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia**

21-22 September 1993, Kampus IPB Darmaga Bogor

BEBERAPA ASPEK DALAM KESEJAHTERAAN KELUARGA

Oleh :
Hidayat Syarief
Hartoyo

PENDAHULUAN

Keluarga sebagai suatu unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menghimpun sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya menempati posisi yang penting dalam pembangunan. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 dinyatakan delapan fungsi keluarga, yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, keagamaan, kecintaan, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan dikembangkannya delapan fungsi keluarga tersebut, institusi keluarga diharapkan mampu menjadi sumberdaya pembangunan yang handal dan penting.

Dalam GBHN 1993 dinyatakan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Hal ini berarti upaya pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Keberhasilan pembangunan, oleh karenanya, dapat diukur dengan semakin meningkatnya kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia. Hanya saja, pengertian kesejahteraan keluarga perlu dirumuskan secara jelas, sehingga bisa diaplikasikan dengan baik dan mudah.

KESEJAHTERAAN MATERIAL vs SPIRITUAL

Kesejahteraan keluarga pada hakekatnya mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material dan spiritual. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan lainnya yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan keluarga.

Untuk menentukan suatu keluarga sudah digolongkan sejahtera secara material atau belum tentunya diperlukan 'cut-off point' pendapatan yang biasa disebut juga garis kemiskinan. Kesulitan yang timbul adalah menentukan 'cut-off point' atau garis kemiskinan tersebut. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebu-

tuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar minimumnya, sehingga bisa dikatakan belum sejahtera secara material.

Kebutuhan dasar minimum ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adat dan kebiasaan, tingkat pembangunan, iklim dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Oleh karenanya, garis kemiskinan akan bervariasi antar kelompok masyarakat dan wilayah. Garis kemiskinan untuk masyarakat pedesaan relatif lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan untuk masyarakat perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar minimum suatu masyarakat mungkin akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Pada kenyataan di lapang, sering dijumpai bahwa pengukuran kesejahteraan secara material kurang mencerminkan kondisi 'kesejahteraan' suatu keluarga yang sebenarnya. Suatu keluarga di pedesaan, walau berpendapatan di bawah garis kemiskinan, merasa lebih sejahtera, daripada keluarga yang berpendapatan lebih tinggi. Oleh karenanya, pengukuran kesejahteraan non-materi (spiritual) dibutuhkan untuk melengkapi pengukuran kesejahteraan secara material. Dengan penggunaan dua dimensi kesejahteraan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang komprehensif tentang kesejahteraan suatu keluarga.

Kesejahteraan spiritual suatu keluarga dapat diukur dengan kualitas kehidupan non-fisik, antara lain: ketakwaan, keselarasan, keserasian, daya juang dan aspek non-fisik lainnya. Suatu keluarga, walau tinggal di bawah garis kemiskinan, mungkin merasa lebih sejahtera, karena mereka lebih merasa bersyukur atas karunia-Nya, karena merasa semua keinginannya sudah terpenuhi, karena merasa telah hidup selaras dengan alam, dan alasan lainnya. Sebaliknya, suatu keluarga mungkin merasa kurang sejahtera, walau sudah berpendapatan di atas garis kemiskinan, karena masih ada saja keinginan yang belum terpenuhi, karena merasa selalu ketakutan dan tertekan, karena merasa selalu 'stress' dan dituntut oleh pekerjaan, dan alasan lainnya.

Kesejahteraan spiritual ini relatif lebih sulit diukur mengingat lebih bersifat subjektif. Akan tetapi tidak berarti bahwa ukuran kesejahteraan spiritual ini kemudian disisihkan dalam mencirikan suatu keluarga sejahtera. Sebagai tantangan untuk para pakar kesejahteraan keluarga adalah merumuskan ukuran kesejahteraan spiritual dan juga material yang dapat dipergunakan secara universal, terukur, dan lebih baik yang bisa dipakai sebagai ciri-ciri suatu keluarga sejahtera.

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Setiap keluarga tentunya ingin meningkatkan kesejahteraan baik materi maupun spiritual. Keinginan ini sejalan dengan apa yang tersirat dalam arah pembangunan keluarga sejahtera seperti tercantum dalam GBHN 1993. Di dalam upaya untuk mencapai keinginan ini, ada beberapa prinsip atau konsep yang perlu diperhatikan:

Keluarga sebagai Sistem Terbuka

Keluarga sebagai pranata sosial merupakan suatu sistem yang terbuka. Artinya bahwa dalam menjalankan fungsinya keluarga dipengaruhi oleh faktor lingkungan (di luar keluarga) yang kurang bisa dikendalikan oleh keluarga itu sendiri. Faktor lingkungan ini tidak dapat diabaikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karenanya, kalau keluarga atau pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka segenap faktor yang ada di luar keluarga harus turut diperhatikan.

Faktor luar keluarga ini dapat bersifat sebagai kendala yang menghambat ataupun kesempatan yang memperlancar upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang berada di daerah yang gersang dan terpencil, akan sulit bagi keluarga tersebut untuk meningkatkan kesejahterannya, karena mereka menghadapi kendala kesuburan tanah dan keterisolasian. Jadi bagaimanapun kuatnya keinginan suatu keluarga di daerah ini untuk meningkatkan kesejahterannya, maka adanya kendala ini sulita bagi keluarga ini untuk mencapai keinginan tersebut.

Sebagai suatu subsistem dari sistem yang lebih besar, keluarga tidak dapat meningkatkan kesejahterannya tanpa melakukan interaksi dengan keluarga lainnya. Sebagai sistem terbuka, keluarga tidak saja berinteraksi dengan lingkungannya, tetapi juga dengan sistem keluarga lainnya.

Kesejahteraan sebagai Hasil dari Suatu Proses

Kesejahteraan keluarga dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses pengembangan sumberdaya keluarga yang selama suatu keluarga itu berada. Artinya bahwa kesejahteraan keluarga yang sekarang dirasakan suatu keluarga merupakan akumulasi hasil yang dicapai dari proses pengembangan sumberdaya keluarga yang telah dilakukan selama siklus kehidupan keluarga. Oleh karenanya, upaya peningkatan kesejahteraan keluarga mungkin akan memerlukan waktu yang relatif lama.

Sebagai suatu hasil dari proses, kesejahteraan keluarga pada hakekatnya akan pula menjadi input untuk proses selanjutnya yang berantai.

Sebagai contoh: suatu keluarga yang berpendapatan relatif lebih tinggi, maka besar kemungkinan mereka akan mampu mengakumulasi pendapatannya lebih baik, melalui kegiatan investasi dan usaha lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga pada saat sekarang akan merupakan modal bagi pencapaian kesejahteraan yang lebih tinggi pada waktu yang akan datang.

Keluarga akan Mengalami Siklus Kehidupan

Keluarga akan mengalami siklus yang sejalan dengan peningkatan umur anggota keluarga. Adanya siklus kehidupan keluarga ini memberi konsekuensi terhadap adanya perubahan kebutuhan dari setiap tahapan siklus kehidupan keluarga. Keluarga muda yang belum mempunyai anak tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan keluarga menengah yang mempunyai anak bersekolah ataupun dengan keluarga tua yang sudah pensiun. Oleh karenanya, pengertian kesejahteraan keluarga dan ukurannya akan bervariasi antar siklus kehidupan keluarga.

Konsekuensi lebih lanjut dari adanya siklus kehidupan keluarga ini adalah bahwa program peningkatan kesejahteraan keluarga juga harus disesuaikan dengan kondisi sumberdaya dari setiap tahapan siklus kehidupan keluarga. Program peningkatan kesejahteraan keluarga haruslah semakin berorientasi pada kesejahteraan spiritual untuk keluarga-keluarga tua, karena pada hakekatnya pada keluarga-keluarga ini pemilikan sumberdaya material sudah relatif mantap.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada hakekatnya dapat dikatakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan salah satu wadah yang menghimpun dan membina sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong dan harus dilakukan sejak dini (sejak dalam kandungan). Oleh karena itu, peranan keluarga, terutama peranan ibu rumah tangga sangat besar dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia generasi yang akan datang.

Kualitas sumberdaya manusia, salah satunya, dapat diukur dengan tingkat pendidikannya. Dari data yang ada menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia (diukur dengan tingkat pendidikan) berhubungan dengan kemiskinan. Pada keluarga miskin yang tinggal di perkotaan, ting-

kat partisipasi pendidikan dasarnya (7-12 tahun) kurang dari 90%, artinya kurang dari 90% anak usia 7-12 tahun dari keluarga miskin yang tinggal di kota menempuh sekolah dasar. Sedangkan untuk keluarga yang tidak miskin, anak yang dapat menempuh SD sebanyak lebih dari 90%.

Untuk level Sekolah Lanjutan Pertama (SLP), persentase anak yang dapat bersekolah di SLP lebih rendah untuk keluarga miskin (72%) dibandingkan untuk keluarga yang tidak miskin (89%). Fenomena ini juga terlihat untuk level Sekolah Lanjutan Atas (SLA), bahkan pada level ini perbedaan persentase partisipasi pendidikan untuk anak dari keluarga miskin dan anak dari keluarga tidak miskin semakin besar, yaitu 33% dan 71%.

Angka partisipasi pendidikan untuk anak keluarga miskin dan tidak miskin juga berbeda untuk keluarga-keluarga yang tinggal di pedesaan. Untuk level SD, angka partisipasi pendidikan untuk anak keluarga miskin adalah 80%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi pendidikan anak dari keluarga tidak miskin (92%). Untuk SLA, proporsi anak dari kelompok keluarga miskin yang bisa menempuh pendidikan SLA hanya 20%, lebih kecil dari keluarga tidak miskin (42%).

Dari data tersebut, terlihat adanya keterkaitan antara kemiskinan dan pendidikan. Kesenjangan dalam pencapaian pendidikan juga terlihat untuk keluarga di pedesaan dan perkotaan. Jadi upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui tingkat pendidikan akan menghadapi kendala yang berat terutama oleh adanya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus mendapat perhatian yang besar dalam Pembangunan Jangka Panjang II dan Pembangunan Lima Tahun ke-enam.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak saja diarahkan untuk peningkatan produktifitas kerja, tetapi juga harus diarahkan untuk memperkuat ketangguhan keluarga. Dalam era globalisasi, keluarga dihadapkan pada sistem nilai dan norma budaya yang berbeda dan mungkin tidak cocok dengan sistem yang ada. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga harus diarahkan untuk memperkuat institusi keluarga, sehingga keluarga mampu menjalankan delapan fungsinya dengan baik.

FAKTOR PENDUKUNG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Sebagai sistem terbuka, keluarga dihadapkan kepada kondisi faktor-faktor di luar keluarga yang akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Faktor-faktor ini haruslah diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

Faktor Ekonomi

Kemiskinan masih merupakan bagian dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada saat sekarang masih ada sekitar 27 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Adanya kemiskinan yang dialami oleh keluarga akan menghambat upaya peningkatan pengembangan sumberdaya yang dimiliki keluarga, yang pada gilirannya akan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Masalah kemiskinan saling berkaitan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia sebagai salah satu faktor produksi. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu dilakukan pendekatan yang efektif, yang dapat memutus 'rantai kemiskinan'. Strategi pembangunan ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menciptakan kondisi yang baik dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Faktor Budaya

Kualitas kesejahteraan keluarga ditandai pula oleh adanya kemantapan budaya yang dicerminkan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kemantapan budaya ini dimaksudkan untuk menetralsisir akibat dari adanya penetrasi budaya luar. Adanya kemantapan budaya diharapkan akan mampu memperkokoh keluarga dalam melaksanakan fungsinya.

Motivasi berkarya (etos kerja) harus pula ditingkatkan agar produktivitas kerja meningkat. Peningkatan produktivitas kerja ini, di level keluarga, akan mampu meningkatkan pendapatan, sehingga pada gilirannya akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sedang di level nasional, peningkatan produktivitas kerja ini akan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Faktor Teknologi

Peningkatan kesejahteraan keluarga juga harus didukung oleh pengembangan teknologi. Keberadaan teknologi dalam proses produksi diakui telah mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Hanya saja, penguasaan dan pengembangan teknologi ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pemilikan modal. Pemilihan teknologi dalam proses produksi juga harus mempertimbangkan lingkungan, disamping pertimbangan ekonomi.

Faktor Keamanan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ditentukan pula oleh adanya stabilitas keamanan yang terjamin. Hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan hasil-hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Faktor Kehidupan Agama

Kesejahteraan keluarga akan menyangkut masalah kesejahteraan spiritual, seperti ketakwaan. Oleh karenanya, program peningkatan kesejahteraan keluarga harus pula didukung oleh kehidupan beragama yang baik. Setiap keluarga diberi hak untuk dapat mempelajari dan menjalankan syariat agamanya masing-masing dengan tanpa memaksakan agama yang satu kepada agama yang lainnya. Sehingga pemahaman keagamaan dan pelaksanaan syariat akan mampu meningkatkan kesejahteraan spiritualnya.

Faktor Kepastian Hukum

Peningkatan kesejahteraan keluarga juga menuntut adanya jaminan atau kepastian hukum. Sebagai contoh: suatu keluarga akan mampu mengusahakan lahannya dengan baik, kalau kepastian akan hak milik lahan tersebut terjamin. Kepastian hukum atas berlakunya peraturan upah minimum yang diterima oleh pekerja pabrik, contoh lainnya, akan memperbesar kemungkinan pekerja atau keluarga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

PENUTUP

Peningkatan kesejahteraan keluarga atau masyarakat pada hakekatnya menjadi tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan haruslah diartikan dalam konteks kesejahteraan material dan spritual, sehingga pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang menyeluruh. Pengentasan keluarga miskin merupakan salah satu indikasi adanya peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga harus memperhatikan sifat dari sistem keluarga yang terbuka dan berinteraksi dengan lingkungannya.